

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemaknaan pelaksanaan kewajiban PPh 21 dari sudut pandang dosen ASN PTN-BH dengan menggunakan teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann, dapat disimpulkan bahwa pemaknaan terhadap kewajiban PPh 21 terbentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Pada tahap eksternalisasi, dosen ASN mengalami perubahan sistem perpajakan setelah perubahan status universitas menjadi PTN-BH yang ditandai dengan meningkatnya kompleksitas administrasi, bertambahnya sumber penghasilan, serta munculnya potensi kurang bayar yang sebelumnya tidak banyak dirasakan.

Pada tahap objektivasi, dosen ASN mulai memahami dan menerima perubahan sistem perpajakan sebagai konsekuensi dari perubahan tata kelola keuangan universitas yang lebih mandiri. Penerimaan tersebut terlihat dari berbagai bentuk penyesuaian terhadap sistem yang berlaku, termasuk penerimaan terhadap kurang bayar sebagai konsekuensi penggabungan penghasilan dan munculnya mekanisme institusional seperti tabungan pajak sebagai upaya adaptasi terhadap realitas perpajakan yang baru.

Pada tahap internalisasi, dosen ASN kerap memaknai pelaksanaan kewajiban PPh 21 sebagai tanggung jawab dan kontribusi kepada negara yang harus dilaksanakan sebagai bagian dari kewajiban warga negara. Namun, di sisi lain, pelaksanaan kewajiban tersebut juga dimaknai sebagai beban administratif dan finansial akibat meningkatnya kompleksitas sistem perpajakan setelah perubahan status PTN-BH. Dengan demikian, konstruksi makna pelaksanaan PPh 21 pada dosen ASN PTN-BH terbentuk melalui pengalaman menghadapi perubahan sistem, proses penyesuaian terhadap realitas baru, serta interpretasi pribadi terhadap kewajiban perpajakan yang dijalankan.

5.2 Keterbatasan dan Saran Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam memahami hasil penelitian. Dikarenakan penelitian ini hanya dilakukan pada dosen ASN di satu PTN-BH, sehingga hasil penelitian menggambarkan konstruksi makna yang terbentuk pada konteks institusi yang diteliti dan belum tentu merepresentasikan pengalaman maupun pemaknaan dosen ASN pada PTN-BH lainnya secara menyeluruh.

Dalam penelitian ini lebih berfokus pada eksplorasi pemaknaan pelaksanaan kewajiban PPh 21 menggunakan perspektif konstruksi sosial, sehingga tidak membahas secara mendalam aspek teknis perpajakan, tingkat kepatuhan, maupun pengukuran tingkat pemahaman perpajakan informan. Oleh karena itu, penelitian ini lebih menekankan pada pengalaman, persepsi, dan makna yang dibentuk oleh informan terhadap pelaksanaan kewajiban PPh 21. Keterbatasan lainnya dari penelitian ini hanyalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan yang terbatas, sehingga temuan penelitian tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi kepada seluruh dosen ASN maupun wajib pajak lainnya. Temuan penelitian lebih diarahkan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai proses konstruksi sosial pemaknaan kewajiban PPh 21 setelah perubahan status Universitas X menjadi PTN-BH.

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan objek penelitian dengan melibatkan informan dari berbagai PTN-BH maupun kelompok wajib pajak lainnya sehingga diperoleh variasi pengalaman dan pemaknaan yang lebih beragam. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji pemaknaan kewajiban perpajakan dengan menggunakan pendekatan teoritis yang berbeda atau dapat mengeksplorasi lebih lanjut pengaruh perubahan kebijakan perpajakan terhadap konstruksi makna wajib pajak dalam berbagai konteks kelembagaan guna memperkaya kajian mengenai perpajakan dari perspektif sosial dan perilaku.